



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH
SUB UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DARDA DARABA**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH**
3. NHK : **204381**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.593.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/132 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 20.6 m2/16.95 m2 di KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 277 m2/84 m2 di KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 555.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 20.6 m2/16.95 m2 di KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 368 m2/122 m2 di KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 373.500.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 428 m2/256 m2 di KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 250.5 m2/157.5 m2 di BOLAANG MONGONDOW, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
8. Tanah Seluas 1126 m2 di KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 310.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA AGYA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	194.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	30.232.042
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.127.732.042
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.127.732.042

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **8 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.